**IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN PERTANIAN DI ERA
OTONOMI DESA (Studi Kasus Dusun Karya Harapan Mukti
Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo)**

*Agricultural Development Implementation in The Era of Village Autonomy
(Case Study: Karya Harapan Mukti Hamlet Bungo District Pelepat Iilir
District)*

Mustakim

Email: agilmustakim88@gmail.com

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Kabupaten Bungo, Jambi

Fikriman

Email: manfikri@ymail.com

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Kabupaten Bungo, Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan pertanian di era otonomi desa dengan mengidentifikasi berapa besar dana desa yang diperuntukkan pada Pembangunan Pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan pertanian di era otonomi Desa di Dusun Karya Harapan Mukti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang pembangunan pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Iilir tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018. Penelitian ini menggunakan indikator pembangunan pertanian yang meliputi kebijakan, kegiatan penyuluhan dan pelatihan, adanya pasar permintaan hasil-hasil pertanian, paket teknologi, kredit usaha, kegiatan pengembangan, pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mendukung pembangunan pertanian di desa sudah memberikan ruang yang sangat luas dan diikuti dengan penganggaran dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang termasuk dalam indikator pembangunan pertanian masuk dalam perencanaan dan penganggaran, baik yang bersumber dari APB Desa maupun non APB Desa. Terhitung mulai tahun 2015 hingga 2018, Dusun Karya Harapan Mukti telah melaksanakan kegiatan yang mendukung sector pertanian sebesar Rp. 314.055.000,- yang bersumber dari APB Desa dan sebesar Rp. 1.267.050.000,- non APB Desa yang bersumber dari masyarakat melalui kelembagaan yaitu Koperasi Unit Desa "Karya Mukti".

Kata kunci: *implementasi; pembangunan pertanian; otonomi desa.*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of agricultural development in the

era of Village autonomy by identifying how much the Village Fund is intended for Agricultural Development in Karya Harapan Mukti Hamlet and identifying the factors that influence the implementation of agricultural development in the era of Village autonomy in Karya Harapan Mukti Hamlet. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, which is to find out and get an idea of agricultural development in Karya Harapan Mukti Hamlet, Pelepat Ilir District, from 2015 to 2018. This study uses agricultural development indicators which include policies, extension activities and training, the market demand for agricultural products, technology, credit, development activities, and the construction and maintenance of infrastructure and facilities for agricultural development. The results of the study indicate that government policies to support agricultural development in the village have provided a very broad space and are followed by budgeting and implementation in the field. The results of the study indicate that the activities included in the indicators of agricultural development are included in the planning, and budgeting, both sourced from the APB Desa and non APB Desa. Starting from 2015 to 2018, Karya Harapan Mukti Hamlet has carried out activities that support the agricultural sector in the amount of Rp. 314,055,000, - originating from APB Desa and amounting to Rp. 1,267,050,000, - non APB Villages originating from the community through institutions namely Village Cooperative Unit "KaryaMukti".

Keywords: *implementation; agricultural development; autonomous village.*

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi Desa, nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan sektor pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Pelaku pembangunan pertanian meliputi departemen teknis terkait, pemerintah daerah, petani, pihak swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Koordinasi di antara pelaku pembangunan pertanian merupakan kerangka mendasar yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Tujuan pembangunan pertanian adalah mem-

bangun sumber daya manusia aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh, meningkatkan pemanfaatan sumber daya pertanian secara berkelanjutan, memantapkan ketahanan dan keamanan pangan, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, menumbuhkan kembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan, dan membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani, Sementara itu, sasaran pembangunan pertanian terwujudnya sistem pertanian industrial yang memiliki daya saing, mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat pertanian, dan terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian serta meningkatnya pendapatan petani (Departemen Pertanian, 2004).

Perjalanan pembangunan pertanian selama ini, sektor pertanian lebih ditempatkan sebagai faktor pendorong pembangunan nasional, bukan sebagai

landasan utama pembangunan nasional. Sebagai bangsa yang besar dengan potensi lahan pertanian yang luas, seharusnya pembangunan bidang pertanian menjadi sektor unggulan atau sektor utama penyokong pembangunan nasional. Usaha untuk mereposisi sektor pertanian menjadi landasan utama pembangunan nasional diakomodasi pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan Perjalanan pembangunan pertanian Pembahasan diarahkan pada kebijakan pembangunan pertanian di daerah, implementasi kebijakan dan dampaknya dalam pembangunan pertanian di daerah (Mayrowani, 2012).

Memasuki era otonomi daerah yang ditandai dengan kebijakan desentralisasi hingga saat ini memberikan berbagai dampak terhadap masyarakat dan perekonomian Indonesia. Seperti dikemukakan diatas bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang pengalihan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat ke Pemerintahan Daerah dalam tata laksana pemerintahan kecuali keamanan dan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, hukum dan masalah keagamaan. Kewenangan Pemerintahan Kabupaten dan Kota mencakup semua sektor pemerintahan termasuk pertanian. Pemerintahan Daerah seharusnya mempunyai inisiatif untuk membuat kebijakan publik yang lebih

tepat berdasarkan pemahaman mereka yang lebih baik tentang kebutuhan masyarakat setempat. Namun, keadaan ini belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tujuan tulisan ini adalah melihat implikasi kebijakan otonomi daerah terhadap pengembangan pertanian di daerah.

Sektor perekonomian Provinsi Jambi di dominasi bidang perkebunan, yaitu kelapa sawit dan karet. Meskipun masih ada potensi sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan timah putih, tetapi itu tidak sedominan kelapa sawit dan karet. Nilai produksi kelapa sawit mencapai 898,24 ribu ton pertahun, sedangkan karet mencapai 240,146 ribu ton pertahun (id.m.wikipedia.org, 2017). Dari semua potensi yang ada, pembangunan ekonomi lebih mudah dilaksanakan terutama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis, mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo (2006-2026) memiliki Visi yaitu "Kabupaten Bungo yang Maju, Harmonis dan Sejahtera" dengan arah Pembangunan Pertanian yang padu dengan sistem agribisnis yang kokoh untuk setiap komoditi unggulan dan Pembangunan bidang peternakan yang mampu menjadi pemasok kebutuhan antar daerah di Provinsi Jambi. Hal tersebut disusun

dalam rangka tercapainya peningkatan Keterkaitan dan keserasian ekonomi Desa dan Kota.

Kebijakan otonomi Desa memberi kebebasan kepada Desa untuk mengambil inisiatif dalam mendesain dan mengembangkan kebijakan lokal secara spesifik. Kewenangan di bidang pertanian (lintas sektor) juga merupakan kewenangan yang tidak luput dari kewenangan lokal berskala desa. Besarnya kewenangan dalam pelaksana kebijakan lokal berskala Desa memberikan dampak positif terhadap pengembangan pertanian. Hal ini yang menyebabkan mengapa isu pentingnya pembangunan pertanian menarik perhatian bagi sebagian orang. Kecenderungan umum menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Desa kurang berpihak pada kegiatan yang terkait dengan pembangunan pertanian terutama dalam perbaikan iklim usaha dan penyuluhan. Hal ini merupakan dampak negatif kebijakan otonomi desa terhadap program lintas sektor (tidak terlepas juga sektor pertanian). Namun dampak positif dari kebijakan otonomi desa terlihat dari beberapa Pemerintah Desa yang telah berhasil mengembangkan pertanian baik secara perdesaan maupun kewilayahan dengan mengimplementasikan beberapa kebijakan desa yang diterbitkan dalam Peraturan Desa.

Salah satu Desa/Dusun dalam Kabupaten Bungo tepatnya di Kecamatan Pelepat Ilir, Dusun Karya Harapan Mukti melalui kebijakan penganggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai tahun 2015 hingga 2018 untuk sektor kebijakan pertanian menitik beratkan pada percepatan produksi dengan mewujudkan Dusun sebagai kawasan produksi

hortikultura dan peternakan dengan memanfaatkan sumberdaya manusia lokal sebagai pelaku, pembangunan infrastruktur lahan usaha tani, dan penyediaan permodalan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Dusun serta lembaga pemasaran melalui Badan Usaha yang ada. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan program empat program. Pertama, membina kelompok tani/ternak melalui program bantuan/penyediaan bibit, obat-obatan, dan sarana produksi penunjang lainnya. Kedua, membangun infrastruktur transportasi kawasan pertanian dan menyediakan lahan produksi penunjang kegiatan peternakan. Ketiga, memfasilitasi akses penyediaan teknologi dalam meningkatkan produksi, dan keempat adalah membentuk lembaga penyedia akses pemasaran dan permodalan melalui Badan Usaha Milik Dusun. Berdasarkan keterangan diatas menjadi menarik dan dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan terhadap implementasi pembangunan pertanian di era otonomi desa yang ada di Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah Dusun Karya Harapan Mukti. Pemilihan tempat didasari oleh observasi awal yang telah dilakukan bahwa Dusun Karya Harapan Mukti adalah Dusun dalam Kabupaten Bungo yang paling banyak mengalokasikan anggaran untuk bidang Pertanian, baik bidang pembangunan (Infrastruktur) seperti Jalan Usaha Tani dan Pembentukan Badan Usaha Milik Dusun yang menyertakan modal untuk kegiatan Penggemukan Sapi maupun bidang

Pemberdayaan seperti Bantuan Bibit kepada Kelompok Tani, Penyuluhan Pertanian dan lain sebagainya. Informasi tersebut diperoleh dari Dinas PMD Kabupaten Bungo yang kemudian ditindaklanjuti dengan meminta informasi kepada Pendamping Desa di Kecamatan Pelepat Ilir, sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada 27 Agustus sampai 22 September 2018.

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu, data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan adalah cara pertama ini dipergunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Menganalisa dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi untuk mencari solusi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi. Langkah-langkah pengumpulan data diantaranya yaitu dengan pendekatan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan (*interviewee*). Data wawancara akan digali dalam hal pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Pengamatan dilakukan untuk melihat kesesuaian indikator Pembangunan Pertanian dengan penganggaran bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dokumentasi yang diperlukan adalah dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti mulai tahun 2015 hingga 2017 termasuk didalamnya peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun, peraturan dusun yang berkaitan dengan pembangunan pertanian dan aturan-aturan lain yang mengatur pelaksanaan dan mekanisme penyaluran anggaran bidang pertanian.

Teknik pengambilan responden dilakukan secara *Purpose sampling* guna mendapatkan informasi yang tepat serta menguasai permasalahan penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2010) bahwa *Purpose sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Responden penelitian ini diambil sebanyak 10 orang (Tabel 1).

Data yang telah dikumpulkan dan diolah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif serta analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data display dan diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembangunan Pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti

Pembangunan pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti dituang dalam RPJM maupun RKP. Untuk mewujudkan pemangunan pertanian maka penganggaran dan pelaksanaan sektor pertanian menjadi prioritas, seperti keberadaan pasar, tersedianya paket

Tabel 1. Responden Penelitian.

No	Responden	Jumlah
1.	Camat Pelepat Ilir	1
2.	Kasi PMD Pelepat Ilir	1
3.	Koord. Pendamping Desa Kecamatan	1
4.	Rio Karya Harapan Mukti	1
5.	Ketua BPD Karya Harapan Mukti	1
6.	Para Ketua Kelompok Tani	3
7.	Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	1
8.	Pendamping Lokal Desa (PLD)	1
Jumlah		10

teknologi, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, serta dibutuhkannya usaha pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian. Pembangunan pertanian memiliki arti luas, yang meliputi bidang-bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Pembangunan pertanian harus dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan daya dukung ekosistem sehingga kontinuitas produksi dapat dipertahankan dalam jangka panjang, dengan menekankan tingkat kerusakan lingkungan sekecil mungkin (Salikin, 2003). Nuddin dkk. (2017), berpendapat bahwa kebijakan pembangunan sektor pertanian haruslah mampu melaraskan paket teknologi berdasarkan dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi yang berbeda terhadap suatu wilayah.

Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian

Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian integral (kesinambungan) dan holistik dari sistem perencanaan pembangunan Daerah yang mengindikasikan arah kebijakan pemerintah pusat yang perlu dijabarkan

lebih rinci dalam arah kebijakan dan program di daerah sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di tingkat lokal/desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa mensyaratkan adanya sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa.

Penyelarasan Pembangunan Pertanian antara Daerah dan Desa

Merencanakan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah penyelarasan program kabupaten dan Desa oleh tim Penyusun RPJM maupun RKP Desa. Berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan desa tersebut terdapat di tahapan kunci yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa yaitu dengan kegiatan Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyusunan Dokumen RPJM Desa, serta Rapat Pencermatan Pagu

Indikatif Dalam Rangka Penyusunan Dokumen RKP Desa.

Penganggaran dan Pelaksanaan Pembangunan Sektor Pertanian

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Mulai tahun 2015 hingga 2018, Dusun Karya Harapan Mukti selalu menganggarkan kegiatan pertanian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada sektor pertanian meliputi beberapa kegiatan yaitu: Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Sektor Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat, Pembiayaan, dan Pengembangan.

1 Pembangunan Saran dan Prasarana Penunjang Sektor Pertanian

Beberapa indikator yang dapat dikelompokkan dalam jenis sarana dan prasarana penunjang pembangunan pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti, yaitu:

- a. Adanya pasar permintaan hasil-hasil pertanian yang merangsang petani untuk memproduksi secara berkelanjutan.
- b. Tersedianya paket teknologi yang diperlukan untuk memproduksi sesuai dengan (permintaan) pasar dan/atau tersedianya paket teknologi tepat guna

(TTG) sebagai sarana produksi pertanian baik yang diberikan langsung kepada petani/keompok tani maupun yang dikelola oleh desa/dusun.

- c. Adanya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan pertanian, utamanya untuk pengairan dan pengangkutan.
 - (1) Terdapatnya prasarana dan sarana seperti pembangunan prasarana dan sarana transportasi penunjang kegiatan pertanian melalui APB Desa berupa Pembangunan jalan usaha tani dan pengadaan kendaraan roda 3 untuk mengangkut hasil pertanian.
 - (2) Terdapat kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan pertanian.

2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri, mampu berdiri diatas kakinya sendiri. Kegiatan pemberdayaan yang menggambarkan kegiatan pembangunan pertanian dapat dilihat dengan adanya penyuluhan pertanian yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian, serta memberdayakan masyarakat agar mampu dan mau berpartisipasi secara aktif. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi:

- a. Terdapat kegiatan penyuluhan, pelatihan pertanian dan peternakan termasuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantekdes).
- b. Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian

dan bantuan stimulan bagi petani dan kelompok tani.

3 *Pembiayaan*

Upaya pembiayaan dimaksud adalah tersedianya kredit bagi petani, baik utamanya berupa kredit produksi dan biaya hidup. Pembiayaan kegiatan disektor pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti hingga saat ini terlihat dari beberapa kelembagaan yang ada yang menyediakan akses kredit bagi petani baik utamanya berupa kredit produksi dan biaya hidup bagi para petani/kelompok tani, yaitu:

- a. Tersedianya Koperasi Unit Desa.
- b. Tersedianya Badan Usaha Milik Desa/Dusun.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa juga dapat mengalokasikan langsung dalam belanja desa berupa bantuan yang langsung disalurkan kepada para petani untuk prioritas keluarga miskin yang masuk dalam kelompok kegiatan pemberdayaan masyarakat.

4 *Pengembangan*

Selanjutnya untuk kegiatan pengembangan yang meliputi adanya kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi teknologi dibidang pertanian, Dusun Karya Harapan Mukti terbantu dengan keberadaan KUD Karya Mukti yang memiliki kegiatan pembuatan dan pengembangan pupuk organik cair dan pellet ikan dengan modal dasar di awal pengembangannya yaitu sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pengembangan pupuk organik cair dan Rp. 85.000.000,- (Delapan Puluh Lima

Juta Rupiah) untuk pengembangan pakan/pelet ikan. Tercatat hingga saat ini, KUD Sari Mukti telah memasarkan pupuk organik cair dan membina masyarakat dengan mengembangkan tanaman sayuran dan hortikultura dengan dengan konsep optimalisasi pekarangan rumah melalui budidaya tanaman sayuran dan hortikultura kerjasama dengan penggerak PKK Dusun.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pembangunan Pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti

1 *Faktor Pendukung*

a. Kebijakan pendukung

Dusun Karya Harapan Mukti dapat leluasa menyelenggarakan pembangunan berbasis desa tidak terlepas dari Kebijakan Pemerintah sebagai bentuk legalisasi. Kebijakan tersebut tertuang jelas dalam Undang-Undang Desa serta regulasi teknis sebagai turunannya dalam pelaksanaan dan pengawalan diberlakukannya Undang-Undang tersebut.

b. Partisipasi masyarakat

Tingkat keberhasilan pembangunan di Dusun Karya Harapan Mukti terutama di sektor pertanian sangatlah tidak dapat dilepaskan dari tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini terbagi menjadi dua kategori, yang pertama partisipasi masyarakat itu sendiri sebagai unsur keterwakilan masyarakat dan kelembagaan seperti Koperasi (KUD Sari Mukti) yang merepresentasikan masyarakat dinilai berkontribusi besar terhadap pembangunan pertanian yang dijalankan.

2 *Faktor Penghambat*

- a. Belum adanya perencanaan yang menggambarkan secara utuh tentang pembangunan pertanian yang berkelanjutan berakibat pada belum terarahnya pembangunan pertanian secara ideal. Hal ini terlihat belum memilikinya rencana strategis pembangunan pertanian sehingga kegiatan yang ada dinilai hanya insidental dan berbasis kondisi yang tampak.
- b. Partisipasi Masyarakat. Disamping sebagai faktor pendukung, partisipasi masyarakat dengan tingkat partisipasi yang rendah juga dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Permasalahan yang tergal di Dusun Karya Harapan Mukti adalah rendahnya keterlibatan kelompok tani dalam kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pemantauan.

Pembangunan cenderung memberikan gambaran jelas adanya masalah dalam pelaksanaan suatu program pembangunan, termasuk diantaranya adalah upaya mengoptimalkan kelompok sebagai sebuah modal sosial bagi kepentingan pembangunan (Muktasam, 2017), khususnya kelompok tani. Umumnya pendekatan yang kurang terkoordinasi mempengaruhi faktor-faktor internal dimana kelompok kelompok tani ikut berperan (Muktasam, 2017), termasuk diantaranya mengambil keputusan untuk menghasilkan pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil identifikasi bahwa Dana

Desa yang diperuntukkan pada Pembangunan Pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo sejak 2015 hingga 2018 sebesar Rp. 314.055.000,- (Tiga Ratus Empat Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari kegiatan pemberdayaan sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), sarana dan prasarana pertanian sebesar Rp. 199.055.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah), dan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Selain Dana Desa yang diperuntukkan pada Pembangunan Pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo terdapat juga sumber keuangan lain (Non APB Desa) sebesar Rp. 1.267.050.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) berasal dari keuangan yang dikelola Koperasi Unit Desa yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sarana dan prasarana pertanian sebesar Rp. 107.050.000,- (Seratus Tujuh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), dan pengembangan sebesar Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan pertanian di era otonomi Desa di Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo meliputi 2 hal, yaitu Faktor Pendukung (kebijakan pendukung dan partisipasi masyarakat), dan Faktor Penghambat yang terdiri dari (1) belum adanya perencanaan yang menggambarkan secara utuh tentang pembangunan pertanian yang berkelanjutan berakibat pada belum terarahnya pembangunan

pertanian secara ideal, (2) rendahnya, dan (3) partisipasi masyarakat.

Saran

Terdapat hal yang dapat disarankan yaitu sangat penting bagi Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti untuk menyusun rencana strategis yang diawali dengan indentifikasi dan pemetaan potensi Desa. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengkolaborasikan antara pemangku kepentingan di desa, penyuluh pertanian, dan pendamping Desa. Selain itu, perlu melakukan langkah strategis terkait memaksimalkan kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi terutama pada kelembagaan kelompok tani agar mereka dapat berdaya dan menjadi pelopor pembangunan pertanian di Dusun Karya Harapan Mukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pertanian. 2004. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta.
- id.m.wikipedia.org/wiki/Jambi. Perekonomian Jambi (diakses 3 Novemeber 2018, melalui link <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jambi>).
- Mayrowani, H. 2012. Pembangunan Pertanian pada Era Otonomi Daerah: Kebijakan dan Implementasi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 30 No. 1, Juli 2012 : 31 - 47. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Muktasam. 2017. Pendekatan Kelompok dalam Pembangunan Pedesaan: Fakta, Harapan, dan Tantangan. Arsyad, M., Suherman, & Ramli (editor). *Realitas Desa Membangun Gagasan dan Pengalaman*. Hal. 122-146. Makassar, Hasanuddin University Press.
- Nuddin, A., Arsyad, M., Wahyudi, D.P., Aswad, M., & Suherman. 2017. Sistem Pertanian Konservasi Menuju Desa Mandiri: Realitas dan Harapan di Sulawesi Barat. Arsyad, M., Suherman, & Ramli (editor). *Realitas Desa Membangun Gagasan dan Pengalaman*. Hal. 268-298. Makassar, Hasanuddin University Press.
- Salikin, K. A. 2003. Sistem Pertanian Berkelanjutan. Kanisius. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung.